

SISTEM PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)

1. Pendahuluan

Dokumen Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari ini merupakan turunan dari Standar LEI 5000 tentang Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Berbagai dokumen berkaitan dengan pelaksanaan program sertifikasi PHTL – seperti dijelaskan dalam Pedoman LEI Seri 30, Dokumen Teknis LEI-03, dan Dokumen Teknis LEI-04 – mengacu ke dokumen ini.

2. Ruang Lingkup

Standar ini merupakan kerangka penilaian sertifikasi PHTL dan menjadi acuan bagi unit manajemen dalam melaksanakan PHTL.

3. Acuan

- a) Standar LEI 5000, Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
- b) Pedoman LEI 99, Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
- c) Tropenbos : *Hierarchical Framework for The Formulation of Sustainable Forest Management Standards*.
- d) *International Tropical Timber Organization (ITTO) Guidelines for The Establishment and Sustainable Management of Planted Tropical Forests*.
- e) *The International Organization for Standardization (ISO) : Standard 14000 Series*.
- f) *The Principles and Criteria for Forest Management of Forest Stewardship Council (FSC)*.

4. Pengertian

Pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan sistem PHTL dirumuskan dari pengertian istilah umum dan istilah teknis kehutanan. Pengertian istilah-istilah berikut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam standar ini :

- 4.1. **Kelestarian Fungsi Produksi** adalah terjaminnya keberlangsungan pemanfaatan hasil hutan dan usahanya.

- 4.2. **Kelestarian Sumberdaya** adalah terjaminnya kemantapan dan keamanan areal hutan tanaman sehingga memberikan kepastian usaha jangka panjang.
- 4.3. **Kelestarian Hasil Hutan** adalah keberlanjutan dan/atau peningkatan produksi hasil hutan dari waktu ke waktu akibat peningkatan upaya pengelolaan hutan sesuai dengan daya dukung lingkungan dalam satu kelestarian unit manajemen.
- 4.4. **Kelestarian Usaha** adalah kemampuan suatu unit manajemen dalam mengelola hutan tanaman untuk memberikan keuntungan dalam batas-batas kemampuan daya dukung hutan.
- 4.5. **Kelestarian Fungsi Ekologi/Lingkungan** adalah salah satu dimensi hasil pengelolaan hutan lestari yang dapat menjamin terpeliharanya fungsi ekosistem beserta komponennya (abiotik dan biotik) dalam jangka panjang.
- 4.6. **Kelestarian Kualitas Lahan dan Air** adalah kemampuan lahan dalam areal unit manajemen hutan tanaman untuk menghasilkan volume kayu/non kayu secara optimal dan lestari serta memberikan kontribusi bagi kelangsungan fungsi tata air di daerah aliran sungai di wilayah tersebut.
- 4.7. **Kelestarian Keanekaragaman Hayati** adalah terpeliharanya keberadaan dan fungsi komponen biotik ekosistem hutan, yaitu : plasma nutfah, tanaman pokok, tanaman penyangga, dan tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat yang dapat menunjang kegiatan hutan tanaman dalam jangka panjang.
- 4.8. **Kelestarian Fungsi Sosial Ekonomi dan Budaya** adalah salah satu dimensi hasil pengelolaan hutan tanaman lestari yang menjamin kesejahteraan dan integrasi sosial melalui pelaksanaan variabel jaminan akses dan kontrol komunitas terhadap sumberdaya hutan, pengendalian dampak perusahaan hutan tanaman terhadap komunitas, dan hubungan ketenagakerjaan yang harmonis antara unit manajemen dan pekerja.
- 4.9. **Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti terhadap Sumberdaya** adalah jaminan bahwa akses pemanfaatan dan penguasaan terhadap sumberdaya hutan yang dimiliki oleh komunitas tetap dihormati oleh unit manajemen.
- 4.10. **Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya** adalah serangkaian kegiatan unit manajemen hutan yang selalu mempertimbangkan dampak perusahaan hutan, yaitu : memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak yang negatif.
- 4.11. **Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja** adalah hubungan ketenagakerjaan dalam unit manajemen yang memperhatikan prinsip kemitraan antara unit manajemen dan pekerja.
- 4.12. **Manajemen Kawasan** adalah strategi pengelolaan areal hutan tanaman yang terdiri atas kegiatan pemantapan, penataan, dan pengamanan areal agar aman dalam jangka panjang.
- 4.13. **Pemantapan Kawasan** adalah bagian kegiatan manajemen areal untuk mendapatkan pengakuan, baik secara hukum maupun atas dasar kesepakatan pihak-pihak terkait untuk mencapai keadilan dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

- 4.14. **Penataan Kawasan** adalah bagian dari kegiatan manajemen areal yang bertujuan untuk mengatur areal hutan menjadi unit-unit manajemen terkecil dalam perusahaan hutan tanaman.
- 4.15. **Pengamanan Kawasan** adalah bagian dari kegiatan manajemen areal yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan dan gangguan-gangguan terhadap areal dan sumberdaya alam.
- 4.16. **Manajemen Hutan** adalah strategi dan serangkaian kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan.
- 4.17. **Kelola Produksi** adalah serangkaian strategi pengelolaan hutan untuk mengatur dan mempertahankan fungsi produksi dalam batas-batas daya dukung lingkungannya.
- 4.18. **Kelola Lingkungan** adalah serangkaian strategi dan kegiatan pengelolaan hutan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif kegiatan perusahaan hutan tanaman terhadap lingkungan.
- 4.19. **Kelola Sosial** adalah bagian dari kegiatan manajemen hutan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat kehadiran unit manajemen bagi masyarakat/komunitas lokal.
- 4.20. **Penataan Kelembagaan** adalah strategi pengelolaan hutan tanaman yang terdiri atas penataan organisasi, peningkatan sumberdaya manusia, dan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi perusahaan hutan dalam menangani penyelenggaraan pengelolaan hutan tanaman.
- 4.21. **Penataan Organisasi** adalah bagian dari penataan kelembagaan yang bertujuan untuk menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang menjamin dapat dilaksanakannya dimensi manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari.
- 4.22. **Peningkatan Sumberdaya Manusia** adalah bagian dari penataan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai pelaksana pengelola hutan tanaman.
- 4.23. **Manajemen Keuangan** adalah bagian dari penataan kelembagaan yang dapat menjamin adanya alokasi biaya untuk reinvestasi sumberdaya agar dapat mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang.

5. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari

Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari akan dapat diwujudkan apabila dimensi hasil (*outcome*) dapat dicapai melalui serangkaian strategi dan kegiatan manajemen yang tepat (dimensi manajemen).

Dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan tanaman, terdapat banyak proses atau faktor yang perlu dilibatkan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan yang ditetapkan. Dengan demikian berbagai proses

dan faktor tersebut memerlukan pengelompokan berdasarkan posisinya dalam sebuah pengelolaan. Berkaitan dengan kerangka penilaian PHTL, pengelompokan berdasarkan posisi tersebut adalah :

- a) **Syarat Keharusan** adalah semua proses atau faktor yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum proses atau faktor lain dilakukan.
- b) **Inti Kegiatan** adalah semua proses atau faktor yang seharusnya dilakukan dalam suatu pengelolaan.
- c) **Syarat Kecukupan** adalah semua proses atau faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan pengelolaan.

Indikator pencapaian PHTL dapat dirumuskan melalui matriks kerangka penilaian sebagaimana disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Kerangka Penilaian Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) pada Tingkat Unit Manajemen

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL							
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi/Lingkungan		Kelestarian Fungsi Sosial Ekonomi dan Budaya		
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil Hutan	Kelestarian Usaha	Kelestarian Kualitas Lahan dan Air	Kelestarian Keanekaragaman Hayati	Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti	Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya	Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja
1. MANAJEMEN KAWASAN								
1.1. Pemantapan Kawasan	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1.2. Penataan Kawasan	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1.3. Pengamanan Kawasan	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
2. MANAJEMEN HUTAN								
2.1. Kelola Produksi	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
2.2. Kelola Lingkungan	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
2.3. Kelola Sosial	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
3. PENATAAN KELEMBAGAAN								
3.1. Penataan Organisasi	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
3.2. Peningkatan Sumberdaya Manusia	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
3.3. Manajemen Keuangan	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR

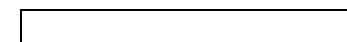
Keterangan :



Syarat Keharusan



Inti Kegiatan



Syarat Kecukupan

Matriks di atas menjelaskan bahwa ketercapaian tujuan dapat diwujudkan melalui tiga kegiatan pokok unit manajemen (dimensi manajemen), yaitu : Manajemen Kawasan, Manajemen Hutan, dan Penataan Kelembagaan. Informasi yang menjelaskan ketercapaian dimensi hasil melalui pelaksanaan dimensi manajemen diukur dengan indikator-indikator. Perlu dicatat bahwa setiap indikator yang dihasilkan dari persilangan itu tidak semuanya memiliki sensitivitas yang dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penilaian.

5.1. Kelestarian Fungsi Poduksi

Kriteria I : Kelestarian Sumberdaya

- P1.1 Kepastian lahan sebagai areal hutan tanaman.
- P1.2 Sistem manajemen kebakaran hutan.
- P1.3 Pemilihan jenis tanaman pokok, sistem dan teknik silvikultur.
- P1.4 Pengembangan manfaat hasil hutan non kayu.
- P1.5 Penerapan pengamatan pertumbuhan tegakan dan hasilnya.
- P1.6 Produksi tahunan sesuai dengan produktivitas hutan, kemampuan penanaman dan daya dukung lahannya.
- P1.7 Kualitas Pembukaan Wilayah Hutan (PWH).
- P1.8 Permasalahan hak-hak atas areal.
- P1.9 Satuan organisasi dalam lingkup pengelolaan hutan.

Kriteria II : Kelestarian Hasil Hutan

- P2.1 Besaran gangguan hutan.
- P2.2 Ketersediaan bibit.
- P2.3 Kemampuan penanaman dan kualitas hasilnya.
- P2.4 Kemampuan pemeliharaan serta kualitas hasilnya.
- P2.5 Penerapan sistem pemanenan hasil hutan ramah lingkungan.
- P2.6 Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- P2.7 Kelancaran dan keteraturan pendanaan untuk setiap aspek kegiatan.

Kriteria III : Kelestarian Usaha

- P3.1 Pengorganisasian areal produksi.
- P3.2 Efisiensi pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman.
- P3.3 Tata usaha hasil hutan internal.
- P3.4 Kesesuaian luas areal produksi efektif dengan perkiraan rentabilitas usaha/kesehatan perusahaan.
- P3.5 Pemanfaatan penelitian dan pengembangan hutan tanaman.
- P3.6 Terbentuknya kemitraan usaha dengan masyarakat setempat.
- P3.7 Peningkatan aset tegakan hutan.

5.2. Kelestarian Fungsi Ekologi/Lingkungan

Kriteria I : Kelestarian Kualitas Lahan dan Air

- E1.1 Persentase atau rasio luas aktual kawasan lindung yang berfungsi baik yang telah ditetapkan/dikukuhkan terhadap luas ideal (seharusnya) kawasan lindung.

- E1.2 Perencanaan penataan areal produksi efektif yang tertata berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahan serta kelangsungan fungsi tata air.
- E1.3 Persentase atau rasio tanda batas aktual kawasan lindung dan areal produksi efektif (kesesuaian dan kemampuan lahan dan kelangsungan fungsi tata air) terhadap tanda batas seharusnya.
- E1.4 Persentase atau rasio tanda batas kawasan lindung yang berfungsi baik terhadap tanda batas seharusnya (ideal).
- E1.5 Perancangan dan penerapan sistem silvikultur yang dapat mengendalikan erosi di areal tebangan atau produksi.
- E1.6 Perubahan tingkat kesuburan tanah (fisik dan kimia), termasuk pencemarannya akibat kegiatan produksi.
- E1.7 Persentase perubahan erosi tanah pada areal produksi.
- E1.8 Persentase perubahan atau hilangnya struktur dan jenis vegetasi pada kawasan lindung.
- E1.9 Persentase perubahan kuantitatif (debit sungai), kontinuitas (ketersediaan air yang konstan) dan kualitas (kandungan bahan kimia, padatan, suspensi) di badan-badan air terhadap ukuran standar yang telah ada yang disebabkan oleh aktivitas unit manajemen.
- E1.10 Penerapan sistem/pola pemanfaatan lahan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tegakan hutan tanaman yang dapat mempengaruhi kondisi kualitas lahan dan fungsi tata air.
- E1.11 Kegiatan perlindungan tanah terhadap erosi dan pencemaran tanah dan air (sebagai contoh : penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk ramah lingkungan).
- E1.12 Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi struktur dan komposisi jenis hutan (vegetasi) kawasan lindung.
- E1.13 Sistem penanganan limbah untuk menjaga kelestarian kualitas lahan dan fungsi tata air.
- E1.14 Penggunaan bahan kimia yang mungkin dapat mencemari air.
- E1.15 Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sistem pola pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan.

Kriteria II : Kelestarian Keanekaragaman Hayati

- E2.1 Persentase luas aktual kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, dan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat) yang berfungsi baik dan yang telah dikukuhkan di lapangan terhadap luas ideal (seharusnya) kawasan lindung.
- E2.2 Penataan areal unit manajemen yang didasarkan pada kepentingan konservasi flora/fauna, perlindungan tegakan hutan tanaman, dan sumberdaya hutan yang sangat berguna bagi masyarakat lokal.
- E2.3 Persentase luas aktual kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, dan areal tanaman kehidupan yang dimanfaatkan oleh masyarakat) yang telah ditata secara baik di lapangan terhadap luas ideal (seharusnya) kawasan lindung.
- E2.4 Terjaminnya/terpeliharanya keamanan kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, dan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat).
- E2.5 Kekayaan jenis satwaliar di areal produksi.
- E2.6 Sistem informasi sumberdaya hutan (lokasi, potensi, teknik budidaya, teknik pemanenan, dll).
- E2.7 Kegiatan pengendalian hama, penyakit dan gulma dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan (sebagai contoh dengan menggunakan predator alaminya), sehingga tidak mengganggu/mengubah ekosistem alami yang ada di dalam areal unit manajemen.
- E2.8 Keberadaan sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.

5.3. Kelestarian Fungsi Sosial Ekonomi dan Budaya

Kriteria I : Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti

- S1.1 Kepastian status areal pemanfaatan hutan.
- S1.2 Kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti.
- S1.3 Komunikasi dan transportasi warga terjamin.
- S1.4 Peluang kerja terbuka bagi seluruh warga komuniti.
- S1.5 Pemanfaatan infrastruktur unit manajemen oleh warga komuniti.

Kriteria II : Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya

- S2.1 Unit manajemen mempertimbangkan terjadinya dampak sosial budaya pada komuniti.
- S2.2 Ada kompensasi terhadap penggunaan atau kerusakan sumberdaya milik warga komuniti.
- S2.3 Penambahan ragam sumber ekonomi bagi warga komuniti.
- S2.4 Jaminan lingkungan yang sehat bagi warga komuniti.
- S2.5 Status kesehatan komuniti terjamin.
- S2.6 Pengadaan fasilitas umum untuk warga komuniti.
- S2.7 Bekerjanya mekanisme pengelolaan konflik.
- S2.8 Tercipta dan terpeliharanya produktivitas usaha warga komuniti.
- S2.9 Besarnya kontribusi unit manajemen dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan unit manajemen.

Kriteria III : Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja

- S3.1 Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja terlindungi.
- S3.2 Keterlibatan pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja.
- S3.3 Kebebasan untuk berserikat terjamin.
- S3.4 Pengadaan fasilitas bagi kesejahteraan pekerja.
- S3.5 Peningkatan karir terbuka bagi seluruh pekerja.
- S3.6 Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi seluruh pekerja.
- S3.7 Upah pekerja memenuhi standar lokal.

Tabel 2. Matriks Prinsip, Kriteria, dan Indikator Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL)

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL							
	KELESTARIAN FUNGSI PRODUKSI			KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI/LINGKUNGAN		KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA		
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil Hutan	Kelestarian Usaha	Kelestarian Kualitas Lahan dan Air	Kelestarian Keanekaragaman Hayati	Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti	Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya	Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja
1. MANAJEMEN KAWASAN 1.1. Pemantapan Kawasan	P1.1 Kepastian lahan sebagai areal hutan tanaman.			E1.1 Persentase atau rasio luas aktual kawasan lindung yang berfungsi baik yang telah ditetapkan/dikukuhkan terhadap luas ideal (seharusnya) kawasan lindung.	E2.1 Persentase luas aktual kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, dan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat) yang berfungsi baik dan yang telah dikukuhkan di lapangan terhadap luas ideal (seharusnya) kawasan lindung.	S1.1 Kepastian status areal pemanfaatan hutan. S1.2 Kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti. S1.3 Komunikasi dan transportasi warga komuniti terjamin.		
2.3. Penataan Kawasan			P3.1 Pengorganisasian areal produksi.	E1.2 Perencanaan penataan areal produksi efektif yang tertata berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahan serta kelangsungan fungsi tata air. E1.3 Persentase atau rasio tanda batas aktual kawasan lindung dan areal produksi efektif (kesesuaian dan kemampuan lahan dan kelangsungan fungsi tata air) terhadap tanda batas seharusnya.	E2.2 Penataan areal unit manajemen yang didasarkan pada kepentingan konservasi flora/fauna, perlindungan tegakan hutan tanaman, dan sumberdaya hutan yang sangat berguna bagi masyarakat lokal. E2.3 Persentase luas aktual kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, dan areal tanaman kehidupan yang dimanfaatkan oleh masyarakat) yang telah ditata secara baik di lapangan terhadap luas ideal (seharusnya) kawasan lindung.			

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL							
	KELESTARIAN FUNGSI PRODUKSI			KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI/LINGKUNGAN		KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA		
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil Hutan	Kelestarian Usaha	Kelestarian Kualitas Lahan dan Air	Kelestarian Keanekaragaman Hayati	Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti	Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya	Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja
1.3. Pengamanan Kawasan	P1.2 Sistem manajemen kebakaran hutan.	P2.1 Besaran gangguan hutan.		E1.4 Rasio atau persentase tanda batas kawasan lindung yang berfungsi baik terhadap tanda batas seharusnya (ideal).	E2.4 Terjaminnya/terpeliharanya keamanan kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, dan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat).			
2. MANAJEMEN HUTAN 2.3. Kelola Produksi	P1.3 Pemilihan jenis tanaman pokok, sistem dan teknik silvikultur. P1.4 Pengembangan manfaat hasil hutan non kayu. P1.5 Penerapan pengamatan pertumbuhan tegakan dan hasilnya. P1.6 Produksi tahunan sesuai dengan produktivitas hutan, kemampuan penanaman dan daya dukung lahannya.	P2.2 Ketersediaan bibit. P2.3 Kemampuan penanaman dan kualitas hasilnya. P2.4 Kemampuan pemeliharaan serta kualitas hasilnya.	P3.2 Efisiensi pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman. P3.3 Tata usaha hasil hutan internal. P3.4 Kesesuaian luas areal produksi efektif dengan perkiraan rentabilitas usaha/kesehatan perusahaan. P3.5 Pemanfaatan penelitian dan pengembangan hutan tanaman.	E1.5 Perancangan dan penerapan sistem silvikultur yang dapat mengendalikan erosi di areal tebangan atau produksi. E1.6 Perubahan tingkat kesuburan tanah (fisik dan kimia), termasuk pencemarannya akibat kegiatan produksi. E1.7 Persentase perubahan erosi tanah pada areal produksi. E1.8 Persentase perubahan atau hilangnya struktur dan jenis vegetasi pada kawasan lindung. E1.9 Persentase perubahan kuantitatif (debit sungai), kontinuitas (ketersediaan air yang konstan) dan kualitas (kandungan bahan kimia, padatan, suspensi) di badan-badan air terhadap ukuran standar yang telah ada yang disebabkan oleh aktivitas unit manajemen.	E2.5 Kekayaan jenis satwalir di areal produksi. E2.6 Sistem informasi sumberdaya hutan (lokasi, potensi, teknik budidaya, teknik pemanenan, dll).	S1.4 Peluang kerja terbuka bagi seluruh warga komuniti.	S2.1 Unit manajemen mempertimbangkan terjadinya dampak sosial budaya pada komuniti. S2.2 Ada kompensasi terhadap penggunaan atau kerusakan sumberdaya milik warga komuniti. S2.3 Penambahan ragam sumber ekonomi bagi warga komuniti.	S3.1 Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja terlindungi.

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL							
	KELESTARIAN FUNGSI PRODUKSI			KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI/LINGKUNGAN		KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA		
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil Hutan	Kelestarian Usaha	Kelestarian Kualitas Lahan dan Air	Kelestarian Keanekaragaman Hayati	Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti	Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya	Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja
2.2. Kelola Lingkungan	P1.7 Kualitas Pembukaan Wilayah Hutan (PWH).	P2.5 Penerapan sistem pemanenan hasil hutan ramah lingkungan.		E1.10 Penerapan sistem/pola pemanfaatan lahan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tegakan hutan tanaman yang dapat mempengaruhi kondisi kualitas lahan dan fungsi tata air. E1.11 Kegiatan perlindungan tanah terhadap erosi dan pencemaran tanah dan air (sebagai contoh : penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk ramah lingkungan). E1.12 Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi struktur dan komposisi jenis hutan (vegetasi) kawasan lindung. E1.13 Sistem penanganan limbah untuk menjaga kelestarian kualitas lahan dan fungsi tata air. E1.14 Penggunaan bahan kimia yang mungkin dapat mencemari air.	E2.7 Kegiatan pengendalian hama, penyakit dan gulma dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan (sebagai contoh dengan menggunakan predator alaminya), sehingga tidak mengganggu/mengubah ekosistem alami yang ada di dalam areal unit manajemen.		S2.4 Jaminan lingkungan yang sehat bagi warga komuniti. S2.5 Status kesehatan komuniti terjamin.	

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL							
	KELESTARIAN FUNGSI PRODUKSI			KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI/LINGKUNGAN		KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA		
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil Hutan	Kelestarian Usaha	Kelestarian Kualitas Lahan dan Air	Kelestarian Keanekaragaman Hayati	Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti	Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya	Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja
2.3. Kelola Sosial	P1.8 Permasyarakatan hak-hak atas areal.		P3.6 Terbentuknya kemitraan usaha dengan masyarakat setempat.	E1.15 Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sistem pola pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan.	E2.8 Keberadaan sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.	S1.5 Pemanfaatan infrastruktur unit manajemen oleh warga komuniti.	S2.6 Pengadaan fasilitas umum untuk warga komuniti. S2.7 Bekerjanya mekanisme pengelolaan konflik. S2.8 Tercipta dan terpeliharanya produktivitas usaha warga komuniti. S2.9 Besarnya kontribusi unit manajemen dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan unit manajemen.	

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL							
	KELESTARIAN FUNGSI PRODUKSI			KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI/LINGKUNGAN		KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA		
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil Hutan	Kelestarian Usaha	Kelestarian Kualitas Lahan dan Air	Kelestarian Keanekaragaman Hayati	Kelestarian Akses dan Kontrol Komuniti	Kelestarian Integrasi Sosial dan Budaya	Kelestarian Hubungan Tenaga Kerja
3. PENATAAN KELEMBAGAAN								
3.1. Penataan Organisasi	P1.9 Satuan organisasi dalam lingkup pengelolaan hutan.	P2.6 Sistem Informasi Manajemen (SIM).						S3.2 Keterlibatan pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja. S3.3 Kebebasan untuk berserikat terjamin. S3.4 Pengadaan fasilitas bagi kesejahteraan pekerja.
3.2. Peningkatan Sumberdaya Manusia								S3.5 Peningkatan karir terbuka bagi seluruh pekerja. S3.6 Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi seluruh pekerja.
3.3. Manajemen Keuangan		P2.7 Kelancaran dan keteraturan pendanaan untuk setiap aspek kegiatan.	P3.7 Peningkatan aset tegakan hutan.					S3.7 Upah pekerja memenuhi standar lokal.